JURNAL CAHAYA EDUKASI

ISSN: 3089-9168 Volume-3, Edisi-3, 2026

# IMPLEMENTASI TATA KELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Muchammad Ardian Dwi Saputra
Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
muchamadardian.22133@mhs.unesa.ac.id
Indonesia

***Abstrak*—**Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga meskipun telah diterapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian meliputi perangkat desa, pengelola TPST, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal, yang ditandai dengan belum meratanya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, masih adanya praktik pembakaran sampah, serta keterbatasan sumber daya. Faktor pendukung meliputi kejelasan regulasi, keberadaan TPST, tenaga operasional, iuran masyarakat, jadwal pengangkutan yang teratur, kejelasan struktur organisasi, komunikasi yang efktif, dukungan para pelaksana, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi belum rendahnya cakupan pelayanan, keterbatasan tenaga kerja dan anggaran, belum tersedianya fasilitas pengolahan yang memadai, belum adanya SOP serta masih rendahnya pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi. Saran yang diberikan yaitu melakukan sosialisasi rutin kepada warga yang masih mencampur sampah, meningkatkan anggaran, menyediakan bank sampah di seluruh wilayah desa, menyediakan pelatihan kepada masyarakat, mengoptimalkan penerapan 3R, mendorong program pemilahan sampah dengan melibatkan masyarakat, menyusun SOP, meningkatkan kesadaran dengan berpartisipasi aktif dan membayar iuran.

***Kata kunci:*** *Implementasi kebijakan, Pengelolaan sampah rumah tangga, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71Tahun 2019, Van Meter & Van Horn*

## I. PENDAHULUAN (*JUDUL 1*)

Implementasi kebijakan merupakan proses dilaksanakannya kebijakan dengan tujuan yang jelas, memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, dan mengikuti aturan hukum yang berlaku (Firdaus, 2022). Implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dan keputusan yang telah ditetapkan dapat secara efektif ditransformasikan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 merupakan salah satu regulasi yang mengatur tentang kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Regulasi ini menyoroti pentingnya upaya mengurangi sampah dengan menerapkan prinsip 3R yaitu mengurangi, memanfaatkan kembali, dan daur ulang. Selain itu, regulasi ini juga mendorong dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam memilah serta mengelola sampah sejak awal. Peraturan Bupati ini bukan hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman teknis bagi pemerintah daerah, desa, serta masyarakat dalam menjalankan kegiatan pengurangan sampah.

Permasalahan sampah di Indonesia menjadi tantangan yang dihadapi hingga saat ini (Firdausi, 2024). Pengelolaan sampah di Indonesia kini menjadi masalah besar karena pertumbuhan populasi menyebabkan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan. Sampah yang menumpuk di lingkungan dapat mengotori air, udara, dan tanah. Penumpukan sampah ini juga dapat menyebarkan penyakit dan bahkan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta dominasi pola pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang cenderung menghasilkan masalah baru.

Di Kabupaten Sidoarjo, jumlah timbulan sampah mengalami perubahan dari tahun 2020 hingga 2024. Persentase sampah yang terkelola juga menunjukkan ketidakstabilan, di mana pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga 73% sebelum kembali meningkat pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah di Kabupateen Sidoarjo

masih belum konsisten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya dalam mencari solusi berkelanjutan untuk menegatasi permasalahan pengelolaan sampah, salah satunya melalui pengelolaan TPA dan pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Desa Kedungturi merupakan salah satu desa di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 3.595 kepala keluarga dengan jumlah timbunan sampah sekitar 4 ton perhari. Untuk mengelola sampah rumah tangga secara mandiri, Desa Kedungturi mendirikan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) sejak tahun 2022 yang dikelola oleh BUMDesa. TPST telah menerapkan prinsip 3R, namun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya sampah yang dibakar, belum menyeluruhnya kegiatan pemilahan sampah oleh masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti Implementasi Tata Kelola Sampah Rumah Tangga di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang meeliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sumber daya penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Sekretaris Desa, penanggung jawab TPST, Sekretaris BUMDesa, mitra pengambil sampah, dan masyarakat serta data sekunder berupa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara teerstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam penelitian ini, setiap variabel digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi mulai dari pelaksanaan kebijakan, dukungan sumber daya, peran organisasi pelaksana hingga kondisi lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

### Standar dan Sasaran Kebijakan

Variabel standar dan sasaran kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wati, 2021), sasaran kebijakan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh seluruh pelaksana agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam implementasi di lapangan. Standar berperan sebagai pedoman dan acuan untuk mengevaluasi kinerja, sedangkan sasaran menunjukkan hasil nyata yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan dijelaskan dalam dua hal yaitu standar kebijakan dan sasaran kebijakan sebagai berikut:

a. Standar Kebijakan

   Standar kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wati, 2021) merupakan pedoman dan acuan untuk mengevaluasi kinerja, sedangkan sasaran menunjukkan hasil nyata yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi telah memiliki dasar kebijakan yang jelas melalui Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengurangan, pengangkutan dan pemilahan sampah di TPST sebagai upaya mendukung prinsip 3R. Keberadaan TPST memberikan perubahan terhadap proses pengelolaan sampah karena sampah yang sebelumnya langsung dibuang ke TPA terlebih dahulu dipilah di TPST sehingga membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

b. Sasaran Kebijakan

   Sasaran kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wati, 2021) bahwa sasaran kebijakan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh seluruh pelaksana agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, sasaran kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut terlihat dari masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, mencampur sampah organik dan anorganik serta melakukan pembakaran sampah rumah tangga. Selain itu, belum seluruh wilayah memperoleh layanan pengelolaan sampah secara

optimal sehingga masih ditemukan penumpukan sampah di lingkungan masyarakat dan saluran air. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah desa.

**Sumber Daya**

Variabel sumber daya menurut teori Van Meter dan Van Horn merupakan sumber pendukung yang digunakan dalam implementasi kebijakan, baik berupa sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana maupun waktu agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan mengalami hambatan di lapangan. Dalam penelitian ini, variabel sumber daya dijelaskan dalam empat hal yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta waktu sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menurut Van Meter dan Van Horn merupakan kemampuan pelaksana kebijakan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi melibatkan pemerintah desa, pengelola TPST, petugas kebersihan dan masyarakat. Petugas kebersihan memiliki peran penting dalam proses pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPST sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan secara rutin. Selain itu, pemerintah desa dan pengelola TPST juga berperan dalam mengoordinasikan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia masih terbatas sehingga proses pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal. Keterbatasan tenaga kerja menyebabkan proses pengangkutan dan pemilahan sampah membutuhkan waktu lebih lama serta belum mampu menjangkau seluruh wilayah desa secara optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah karena masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga.

b. Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran menurut Van Meter dan Van Horn merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi didukung melalui iuran masyarakat yang dikelola oleh BUMDesa. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional seperti pengangkutan sampah, pemeliharaan fasilitas dan kebutuhan operasional TPST. Adanya dukungan anggaran membantu kegiatan pengelolaan sampah tetap berjalan secara rutin.

Meskipun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan dalam pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga. Keterbatasan dana menyebabkan fasilitas pengelolaan sampah belum dapat dikembangkan secara maksimal dan pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi masyarakat juga belum berjalan optimal. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

c. Sumber daya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menurut Van Meter dan Van Horn merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Kedungturi telah memiliki TPST, mesin conveyor dan kendaraan pengangkut sampah yang membantu proses pengelolaan sampah rumah tangga. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut membantu proses pengangkutan dan pemilahan sampah menjadi lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Selain itu, adanya TPST juga membantu mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai. Fasilitas pengolahan sampah masih terbatas sehingga proses pemanfaatan dan pengolahan sampah belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pengelolaan sampah masih berfokus pada pengangkutan dan pemilahan sampah, sedangkan kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah masih belum maksimal.

d. Sumber daya waktu

Waktu menurut Van Meter dan Van Horn merupakan ketepatan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pengangkutan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi telah dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal pengangkutan sampah membantu menjaga kebersihan lingkungan masyarakat dan mengurangi penumpukan sampah di lingkungan desa. Selain itu, keberadaan jadwal operasional juga membantu pengelola TPST dalam mengatur proses pengangkutan dan pengelolaan sampah.

Namun, keterbatasan tenaga kerja dan fasilitas menyebabkan proses pengelolaan sampah membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah belum

berjalan secara maksimal terutama ketika volume sampah meningkat. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, ketepatan waktu dalam pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

**Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Variabel karakteristik organisasi pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn merupakan karakteristik badan atau organisasi pelaksana yang berperan dalam menjalankan kebijakan agar implementasi dapat berjalan secara efektif dan terarah. Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur organisasi, hubungan kerja antar lembaga, pembagian tugas, pengawasan serta koordinasi antar pelaksana dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur dan koordinasi yang baik akan membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih optimal dan terorganisir. Dalam penelitian ini, karakteristik organisasi pelaksana dijelaskan dalam tiga hal yaitu struktur organisasi pelaksana, koordinasi dan hubungan antar lembaga serta pengawasan, evaluasi dan pembagian tugas sebagai berikut:

a. Struktur organisasi pelaksana

   Struktur organisasi pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn merupakan susunan organisasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi pengelolaan sampah di Desa Kedungturi sudah terbentuk dengan melibatkan pemerintah desa, BUMDesa dan pengelola TPST. Struktur organisasi tersebut membantu pembagian tugas dalam kegiatan pengangkutan, pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah.

   Keberadaan struktur organisasi juga membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing pelaksana dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pemerintah desa berperan dalam mendukung kebijakan dan operasional pengelolaan sampah, sedangkan pengelola TPST bertugas menjalankan kegiatan teknis pengelolaan sampah di lapangan.

b. Koordinasi dan hubungan antar lembaga

   Koordinasi dan hubungan antar lembaga menurut Van Meter dan Van Horn merupakan hubungan kerja antar pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara pemerintah desa, BUMDesa dan pengelola TPST berjalan cukup baik dalam mendukung keberlangsungan pengelolaan sampah rumah tangga. Koordinasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pengangkutan sampah serta pengelolaan operasional TPST.

   Hubungan kerja antar lembaga membantu mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah agar tetap berjalan secara rutin. Namun, koordinasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga masih memerlukan penguatan terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

c. Pengawasan, evaluasi, dan pembagian tugas

   Pengawasan, evaluasi dan pembagian tugas menurut Van Meter dan Van Horn merupakan bentuk pengendalian pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian tugas antar pelaksana pengelolaan sampah di Desa Kedungturi sudah cukup jelas dalam proses pengangkutan dan pengelolaan sampah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya SOP menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan masih belum tertata secara maksimal.

   Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan juga belum berjalan optimal sehingga masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, pengawasan dan evaluasi yang belum optimal dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

**Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn merupakan proses penyampaian informasi, koordinasi dan aktivitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan agar implementasi dapat berjalan secara konsisten dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang baik diperlukan agar seluruh pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam implementasi di lapangan. Dalam penelitian ini, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dijelaskan melalui koordinasi antar pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat dan aktivitas pelaksana dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah desa, BUMDesa, pengelola TPST dan RT/RW. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan pengangkutan, pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga agar berjalan secara rutin dan

teratur. Pemerintah desa juga melakukan komunikasi dengan pengelola TPST terkait operasional pengelolaan sampah dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebagai bentuk penerapan prinsip 3R.

Komunikasi yang dilakukan cukup membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga serta mendukung pelaksanaan pengangkutan sampah secara rutin. Aktivitas pelaksana juga telah berjalan melalui kegiatan pengangkutan sampah sesuai jadwal serta pemilahan sampah di TPST sebelum dibuang ke TPA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan aktivitas pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan aktivitas pelaksana belum sepenuhnya optimal. Sosialisasi yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat sehingga masih terdapat warga yang belum menerapkan pemilahan sampah dari rumah tangga dan masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, belum adanya SOP juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lapangan masih menyesuaikan kondisi operasional yang ada. Aktivitas pelaksana juga masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan tenaga kerja dan belum optimalnya fasilitas pengelolaan sampah sehingga proses pengelolaan sampah belum berjalan maksimal.

**Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Variabel disposisi atau sikap pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn merupakan sikap, komitmen dan dukungan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh kesediaan pelaksana dalam menerima dan menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, disposisi atau sikap pelaksana dijelaskan melalui komitmen pemerintah desa dan pengelola TPST serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa dan pengelola TPST memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi. Komitmen tersebut terlihat dari adanya upaya pemerintah desa dalam mendukung keberlangsungan operasional TPST serta pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah secara rutin. Selain itu, pengelola TPST juga berupaya menerapkan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah rumah tangga sebelum dibuang ke TPA sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Dukungan pelaksana juga terlihat dari upaya menjaga keberlangsungan operasional pengelolaan sampah melalui iuran masyarakat dan pengelolaan sampah secara rutin. Pemerintah desa dan pengelola TPST juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah rumah tangga secara lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki sikap yang mendukung terhadap implementasi tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, melakukan pembakaran sampah rumah tangga dan belum melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memanfaatkan keberadaan TPST secara maksimal dalam mendukung pengelolaan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan.

**Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik menurut Van Meter dan Van Horn merupakan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan yang mendukung akan membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih optimal, sedangkan kondisi lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, lingkungan sosial, ekonomi dan politik dijelaskan dalam tiga aspek yaitu lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik sebagai berikut:

a. Lingkungan sosial

Lingkungan ekonomi menurut Van Meter dan Van Horn merupakan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial masyarakat Desa Kedungturi mulai menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah rumah tangga. Keberadaan TPST membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah

sehingga lingkungan desa menjadi lebih bersih dibandingkan sebelumnya.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menerapkan pemilahan sampah dan masih melakukan pembuangan serta pembakaran sampah sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga masih belum merata sehingga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kedungturi.

b. Lingkungan ekonomi

Lingkungan ekonomi menurut Van Meter dan Van Horn merupakan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial masyarakat Desa Kedungturi mulai menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah rumah tangga. Keberadaan TPST membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga lingkungan desa menjadi lebih bersih dibandingkan sebelumnya.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menerapkan pemilahan sampah dan masih melakukan pembuangan serta pembakaran sampah sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga masih belum merata sehingga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kedungturi.

c. Lingkungan politik

Lingkungan politik menurut Van Meter dan Van Horn merupakan dukungan pemerintah dan kebijakan yang memengaruhi implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga melalui pembentukan TPST dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa. Dukungan tersebut terlihat dari adanya kebijakan pengelolaan sampah dan dukungan terhadap operasional pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi.

Dukungan pemerintah desa membantu keberlangsungan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal.

**Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Faktor pendukung dapat membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih optimal, sedangkan faktor penghambat dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, faktor pendukung dan penghambat implementasi tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi dijelaskan berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung implementasi tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi terlihat dari adanya dukungan pemerintah desa terhadap keberlangsungan operasional pengelolaan sampah melalui pembentukan TPST dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah secara rutin. Selain itu, keberadaan TPST membantu proses pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih terarah dibandingkan sebelumnya. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya koordinasi antara pemerintah desa, BUMDesa dan pengelola TPST dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga. Ketersediaan sarana seperti kendaraan pengangkut sampah, mesin conveyor dan petugas kebersihan juga membantu mendukung kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.

Selain dukungan pemerintah desa, faktor pendukung lainnya terlihat dari mulai meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui adanya masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan pengangkutan sampah dan mendukung kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi. Adanya iuran masyarakat juga membantu mendukung keberlangsungan operasional pengelolaan sampah sehingga kegiatan pengangkutan sampah dapat dilakukan secara rutin.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola sampah rumah tangga masih menghadapi beberapa faktor penghambat. Hambatan utama terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga serta masih adanya masyarakat yang membuang dan membakar sampah sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih belum merata sehingga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lingkungan masyarakat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi. Keterbatasan tenaga kerja,

keterbatasan anggaran operasional dan belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah menyebabkan proses pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal. Belum adanya SOP juga menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan masih belum tertata secara optimal sehingga kegiatan pengelolaan sampah masih menyesuaikan kondisi operasional yang ada.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi tata kelola sampah rumah tangga di Desa Kedungturi menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka kesimpulan dijelaskan sebagai berikut:

**Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi telah memiliki dasar yang jelas melalui Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengangkutan, pemilahan dan pengelolaan sampah di TPST. Namun, sasaran kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat masyarakat yang membuang dan membakar sampah sembarangan serta belum melakukan pemilahan sampah rumah tangga. Faktor pendukung dalam variabel ini yaitu adanya dasar kebijakan dan dukungan pemerintah desa, sedangkan faktor penghambatnya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

**Sumber Daya**

Implementasi kebijakan telah didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan waktu operasional. Desa Kedungturi telah memiliki TPST, kendaraan pengangkut sampah dan petugas kebersihan yang membantu kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, keterbatasan tenaga kerja, anggaran dan fasilitas pengolahan sampah menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan maksimal. Faktor pendukungnya yaitu adanya fasilitas dan dukungan operasional, sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sumber daya yang tersedia.

**Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik organisasi pelaksana dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi sudah cukup baik karena melibatkan pemerintah desa, BUMDesa dan pengelola TPST dengan pembagian tugas yang cukup jelas. Koordinasi antar lembaga juga berjalan cukup baik dalam mendukung operasional pengelolaan sampah. Namun, belum adanya SOP menyebabkan pelaksanaan tugas dan pengawasan di lapangan belum optimal. Faktor pendukungnya yaitu adanya struktur organisasi dan koordinasi antar lembaga, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum optimalnya pengawasan dan standar operasional prosedur.

**Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dilakukan melalui koordinasi antar pelaksana serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga. Aktivitas pelaksana juga telah berjalan melalui kegiatan pengangkutan dan pemilahan sampah secara rutin. Namun, sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga masih terdapat warga yang belum menerapkan pemilahan sampah rumah tangga. Faktor pendukungnya yaitu adanya koordinasi dan sosialisasi, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

**Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Pemerintah desa dan pengelola TPST memiliki komitmen dalam menjalankan pengelolaan sampah rumah tangga melalui kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah secara rutin. Selain itu, pelaksana kebijakan juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, partisipasi masyarakat masih belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang membuang dan membakar sampah sembarangan. Faktor pendukungnya yaitu adanya komitmen pelaksana kebijakan.

**Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik cukup memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi. Dukungan pemerintah desa dan keberadaan TPST menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, mulai terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, keterbatasan ekonomi operasional, rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya pengolahan sampah masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kedungturi.

## REFERENSI


[1] Agustin, L., Hariyoko, Y., & Murti, I. (2025). Implementation of Gresik Regency Regional Regulation Number 6 of 2015 on Environmental Protection and Management in Industrial Activities in Gresik Regency. *Jurnal Integrasi Multi Disiplin*, 1(1), 1–10

[2] Ali, Y. D. A., Asmiddin, & Ramadhan, S. (2024). *Implementasi kebijakan pengelolaan*

*persampahan rumah tangga di Kota Baubau*. Jurnal Riseta Soshum, 1(2), 51–60

[3] Artha, A. D., Nurasa, H., & Candradewini. (2023). *Kolaborasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat peluang dan inovasi kebijakan*. Matra Pembaruan, 7(1), 25–36

[4] Astuti, W., & Kamil, I. (2024). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung)*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(5), 5328–5341

[5] Chen, H. L., Nath, T. K., Chong, S., Foo, V., Gibbins, C., & Lechner, A. M. (2021). *The plastic waste problem in Malaysia: Management, recycling and disposal of local and global plastic waste. SN Applied Sciences, 3*(437).

[6] Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). *Pengumpulan Data Penelitian.* J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(5), 5423–5443

[7] Fauziah, N., & Sumiati, T. (2022). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Pasirkaliki Kota Cimahi. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 3(2), 132–138

[8] Fadillah Nurmaisyah, & Susilawati. (2022). *Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. PUBHEALTH: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 91–96

[9] Firdaus, A. P. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

[10] Firdausi, E. (2024). Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, *5*(1), 60–65

[11] Kalfin Febrian Nababan, Ardinia Awanis Shabrina, & Indah Satria. (2024). *Implementasi Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung Bandar Lampung). Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 73–79

[12] Mahartin, T. L. (2023). Waste management plan with reduce, reuse, recycle (3R) method.Journal of Sustainability, Society and Eco-Welfare, 1(1), 49–59

[13] Millah, A. S., Apriyani, A., Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas.* Jurnal Kreativitas Mahasiswa, 1(2), 140–153

[14] Mostaghimi, K., & Behnamian, J. (2023). *Waste minimization towards waste management and cleaner production strategies: A literature review. Environment, Development and Sustainability, 25*, 12119–12166

[15] Nashrullah, M., et al. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data).* Sidoarjo: UMSIDA Press.

[16] Nepal, M., Nepal, A. K., Khadayat, M. S., Rai, R. K., Shyamsundar, P., & Somanathan, E. (2022). *Low-cost strategies to improve municipal solid waste management in developing countries: Experimental evidence from Nepal. Environmental and Resource Economics, 84*(4), 729– 752

[17] Nur, Z., Sulaiman, U., & Rahman, U. (2024). *Metodologi Penelitian: Analisis Konseptual untuk Memahami Hakikat, Tujuan, Prosedur, dan Klasifikasi Penelitian.* PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology, 4(1)

[18] Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.* Journal of Management, Accounting and Administration (JoMAA), 1(2), 77–84.

[19] Raudah, S., Amalia, R., & Nida, K. (2022). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.* Al 'Iidara Balad, 4(1), 49–54

[20] Siti Raudah, Risna Amalia, & Khairun Nida. (2022). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. *Al 'Iidara Balad*, 4(1), 49–58.

[21] Subekti, S., Sasmito, A., & Rahman, B. (2023). *Pemanfaatan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang sebagai sumber energi baru terbarukan.* Merdeka Indonesia Journal International (MIJI), 3(1), 54–63

[22] Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier.* Jurnal Edu Research, 5(3), 110–116. Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)

[23] Suryani, A. S. (2014). *Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).* Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, *5*(1), 71–84

[24] Suwestian, M. F., Ghalib, S., & Utomo, S. (2015). *Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen*

[25] *Keselamatan Pelayaran (Studi di PT. Maritim Barito Perkasa Banjarmasin).* Jurnal Bisnis dan Pembangunan, 3(1), 1–5.

[26] Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif.*Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, 2(1), 160–166

[27] Vorobeva, D., Scott, I. J., Oliveira, T., & Neto, M. (2022). *Adoption of new household waste management technologies: The role of financial incentives and pro-environmental behavior*. *Journal of Cleaner Production*, 362, 132328.

[28] Wati, N. R. (2021). *Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Kraton Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo).* Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang